

# MASALAH SOSIAL TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI SHELTER KBRI KUALA LUMPUR

Sutaat

## ABSTRAK

*Tulisan ini merupakan hasil penelitian studi kasus di Shelter KBRI Kuala Lumpur-Malaysia. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang masalah sosial TKW dan pelayanan sosial TKW di Shelter KBRI. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan terdiri dari: TKW-bermasalah, Petugas KBRI Kuala Lumpur, Agency, dan LSM peduli terhadap permasalahan TKW.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sumber permasalahan yang dihadapi TKW, baik karena faktor internal maupun eksternal, antara lain: (a) minimnya pembekalan (keterampilan teknis); (b) kualitas keterampilan dan kemampuan berkomunikasi TKW masih dibawah rata-rata tenaga kerja asal negara lain; dan (c) TKW mengalami masalah besar dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja (culture shock). Dampak dari kondisi tersebut memunculkan berbagai masalah, antara lain tindak kekerasan, eksploitasi, pemaksaan kultur majikan terhadap TKW, dan perasaan tertekan (tidak betah).*

*Beberapa rekomendasi diajukan hasil penelitian ini antara lain: (1) pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai unsur, baik antar instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam pengiriman TKW; (2) perlu pembekalan keterampilan khususnya kemampuan bahasa asing dan keterampilan teknis sebelum TKW diberangkatkan ke luar negeri.; (3) Departemen Sosial dapat melakukan fungsi preventif, rehabilitatif, dan developmental. Fungsi rehabilitatif terutama terhadap TKW-bermasalah yang ada di Shelter KBRI Kuala Lumpur, dalam bentuk pelayanan sosial.*

**Kata kunci : Tenaga Kerja Wanita (TKW)**

## I. LATAR BELAKANG

Secara ideal, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dijadikan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri. Di satu sisi pemerintah memberi julukan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) sebagai "Pahlawan Devisa". Pada sisi lain pengiriman tenaga kerja ke luar negeri khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) mempunyai akibat sampingan yang menyangkut masalah kesejahteraan, dan bahkan banyak yang mengalami permasalahan yang fatal sampai kehilangan nyawa.

Data resmi yang dihimpun oleh Depnakertrans Indonesia (Ditjen, PPTKLN, 2004) jumlah kedatangan TKI bermasalah tahun 2002-2004 dari kawasan Asia-Pasifik seluruhnya mencapai 14.372 orang. Dari sejumlah TKI tersebut yang terbanyak dari Singapura (5.793 orang). Sementara itu data penempatan TKI formal dan informal untuk Malaysia mencapai 20.007 orang (16.050 orang di antaranya

TKW), dan Singapura mencapai 3.966 orang (seluruhnya TKW). Sebagian besar TKW tersebut dan bahkan untuk Singapura seluruhnya bekerja pada sektor informal (sektor domestik).

Secara nalar keberadaan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia sebenarnya sangat berarti bagi perekonomian kedua negara. Bagi Indonesia, mendapat devisa dari penerimaan uang *remittance* yang dibawa/dikirim oleh pekerja ke daerah asal mereka. Sementara bagi Malaysia, kehadiran Tenaga Kerja Indonesia dapat membantu negara itu mengatasi kesulitan pasokan tenaga kerja di sektor formal tertentu dan sektor informal, yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja setempat.

Oleh karena itu, sudah bukan rahasia umum lagi kalau Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia banyak mengisi lapangan kerja di sektor informal terutama pada subsektor Pembantu Rumah (*house maid*) dan perkebunan (kelapa sawit dan karet). Untuk memanfaatkan peluang ekonomi tersebut, pemerintah

Indonesia telah mempersiapkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) agar mampu bekerja profesional, dan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lainnya. Kenyataan di lapangan berbeda, daya saing mereka ternyata lemah, sehingga menjadi sasaran eksploitasi pihak-pihak tertentu. Belum lagi TKW yang masuk secara ilegal ke Malaysia, akan menjadi rawan dari tindakan aparat negara yang bersangkutan. Mereka merupakan tenaga kerja yang tidak mendapat perlindungan secara memadai. Tidak heran kalau banyak laporan jurnalistik di Indonesia mengungkap berbagai kasus *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh 'users', pihak majikan, dan agen-agen pengerah tenaga kerja setempat di Malaysia. Banyaknya kasus tindak kekerasan TKW di Malaysia sudah sampai pada titik kritis, karena menyangkut HAM dan hubungan baik antar kedua negara.

Terkait dengan permasalahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerjanya di Malaysia. Untuk ini kesepakatan telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, antara lain dalam kesempatan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dalam tanggal 14 Februari 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua pemimpin itu menyepakati akan menekan jumlah tenaga kerja ilegal dari Indonesia hingga mencapai nol persen. Bahkan, Pemerintah Malaysia telah menyediakan sistem *matriks* yang merekam semua pendatang asing melalui sidik jari. Menurut mereka, sistem tersebut diyakini tidak akan lagi memberi ruang dan peluang bagi "pendatang haram" (tanpa izin) di negara itu. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul tidak hanya pada tenaga kerja ilegal tetapi juga yang tergolong legal.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun banyak terjadi kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW), tetap saja arus pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dengan demikian permasalahannya adalah bagaimana berbagai pihak-pihak yang bertanggung jawab mampu memberikan perlindungan dan pelayanan sosial terhadap

pekerja Indonesia. Perlindungan dan pelayanan sosial dimaksud semestinya sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan TKW. Selama ini belum diketahui secara jelas permasalahan sosial apa yang dihadapi TKW. Terkait dengan itu, maka perlu dikaji permasalahan sosial apa yang dihadapi TKW, bentuk pelayanan dan perlindungan apa yang sudah diberikan kepada TKW (terutama TKW-bermasalah). Studi ini mencoba berfokus pada TKW-bermasalah di Shelter KBRI.

## II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Teridentifikasinya permasalahan sosial yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKW) di Shelter KBRI Kuala Lumpur - Malaysia.
2. Teridentifikasinya pelayanan sosial yang diperoleh TKW di Shelter KBRI Kuala Lumpur-Malaysia.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah masukan bagi perumusan kebijakan Departemen Sosial, dan berbagai instansi terkait dalam upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi TKW di negara tujuan.

## III. TINJAUAN TEORITIS

Fenomena pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang diatur pemerintah sebenarnya telah dimulai sejak jaman kolonial Belanda, yaitu pengiriman tenaga kerja Indonesia ke daerah koloni seperti ke Suriname, di Amerika Latin. Pengiriman tenaga kerja Indonesia waktu itu merupakan kebijakan Pemerintah Kononial dalam rangka pengembangan daerah koloni untuk kepentingan eksistensi jajahan. Sementara itu, pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri saat ini tidak hanya kepentingan negara pengguna, tetapi juga kepentingan tenaga kerja Indonesia sendiri sebagai upaya meningkatkan penghasilan.

Sementara itu di beberapa negara (terutama negara berkembang yang sedang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Malaysia). Pada sektor formal dan informal tertentu memerlukan cukup banyak tenaga kerja dari negara lain. Keberadaan pekerja migran di suatu negara merupakan

jawaban atas perkembangan saling ketergantungan ekonomi tersebut. Makin tinggi intensitas hubungan yang terjalin antar-negara dalam berbagai kehidupan, makin tinggi ketergantungan antar-negara, dan pada gilirannya makin meningkatkan arus migrasi dalam berbagai bentuk (Kritz dan Zlotnik, 1992; Lohrmann, 1989).

Sejak dekade 1980-an penderahan tenaga kerja Indonesia (termasuk Tenaga Kerja Wanita/TKW) ke luar negeri mengalami *booming* pada tahun 1990-an dan terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, pengiriman tenaga kerja memiliki kecenderungan adanya dominasi tenaga kerja perempuan dengan jumlah lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Kondisi yang demikian itu antara lain dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi di dalam negeri, dan makin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja.

Tekanan kebutuhan lapangan kerja serta keinginan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan melepaskan diri dari jeratan kemiskinan, kadang-kadang membuat segala pertimbangan rasional dikesampingkan oleh para calon tenaga kerja. Tingginya permintaan tenaga kerja perempuan dari sejumlah negara mengakibatkan pihak perusahaan penderahan tenaga kerja di dalam negeri juga kurang serius dalam mempersiapkan calon tenaga kerja. Sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia kurang memadai untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada.

Rendahnya pendidikan dan rendahnya keterampilan yang dimiliki tenaga kerja Indonesia, menjadikan mereka kurang memiliki kekuatan tawar terhadap pengguna/majikan (*user*). Teori ekonomi memang seperti itu: bila pasokan tenaga kerja berlebih, maka upah akan rendah, dan kalau sudah demikian maka sering terjadi pihak majikan mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi pekerjanya. Oleh karena itu muncul berbagai permasalahan sosial sekitar pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama di kalangan tenaga kerja wanita di sektor informal. Hal lain yang juga menambah permasalahan adalah makin banyaknya pengiriman tenaga kerja secara ilegal, dan terjadinya berbagai kasus *trafficking*.

Permasalahan TKW yang menjadi fokus penelitian ini terutama masalah sosial yang dialami TKW yang berada di penampungan (*shelter*) KBRI Kuala Lumpur. Masalah sosial dimaksud terutama berhubungan dengan tidak terpenuhinya pelayanan sosial secara optimal sesuai yang dibutuhkan.

Pelayanan sosial, dalam konsep pekerjaan sosial selalu terkait dengan praktek pekerjaan sosial, yaitu berbagai kegiatan yang melibatkan pekerja-pekerja sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan dari praktek pekerjaan sosial yaitu mencegah dan menyembuhkan kerusakan hubungan di antara perorangan dengan keluarganya atau persekutuan lainnya. Praktek pekerjaan sosial membantu orang-orang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam hubungan-hubungan antar mereka atau paling tidak untuk meminimalkan akibat-akibat kerusakan hubungan tersebut (Skidmore Rex, A, 1994).

Pelayanan sosial TKW dalam konteks penelitian ini adalah program-program sosial yang dirancang oleh pemerintah maupun masyarakat, yang ditujukan untuk membantu, melindungi, dan memulihkan kehidupan TKW. Pelayanan ini dimaksudkan guna mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh faktor internal dan external, serta mengembangkan kemampuan TKW untuk memahami, menjangkau, dan menggunakan pelayanan-pelayanan sosial yang tersedia. Bentuk-bentuk layanan sosial antara lain berupa pendidikan publik, peningkatan SDM, keamanan, kesehatan, tempat tinggal, bantuan advokasi, konsultasi psikologis, dan berbagai layanan sosial lainnya.

#### IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara deskriptif menyajikan gambaran tentang permasalahan sosial dan pelayanan sosial terhadap pekerja Indonesia di luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita (TKW-bermasalah) di Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk itu, peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan interaksi langsung dengan obyek penelitian dalam upaya mendapatkan informasi secara mendalam.

Penelitian ini dilakukan di Kota Kuala Lumpur Malaysia, dimana terdapat tempat penampungan TKW-bermasalah (Shelter KBRI Kuala Lumpur). Informan penelitian ini terdiri dari petugas KBRI, agency (agen TKW di Malaysia), pengguna tenaga kerja (perusahaan), dan TKW (terutama yang ada di penampungan).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya hanya sebagai panduan dan dilakukan secara bebas tetapi terfokus. Pengamatan dianggap berguna untuk menggali informasi yang sulit untuk diwawancara, dengan harapan informasi yang diperoleh dapat lebih obyektif.

Melakukan wawancara dengan "TKW-bermasalah" dimaksud tidak mudah dilakukan karena sikap "tertutup" yang bersangkutan, maka untuk ini peneliti didampingi pihak ketiga dari KBRI Kuala Lumpur dan pihak-pihak yang mengenal dan/atau dikenal secara baik oleh TKW. Dengan cara seperti ini penggalian informasi yang dibutuhkan menjadi lebih mudah. Namun demikian, peneliti tetap menghargai hak azasi TKW, dan oleh karenanya peneliti benar-benar menjaga kehormatan dan kerahasiaan responden.

Analisa data didukung oleh data literatur dan sumber informasi lain berkaitan dengan masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya yang terkait dengan masalah tenaga kerja wanita (TKW). Hasil dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan informan, dideskripsikan sebagaimana data yang ada.

## V. KEADAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Keadaan tahun 2005, tenaga kerja Indonesia di Malaysia menduduki posisi pertama dalam hal jumlah, kemudian disusul oleh tenaga kerja dari Nepal, India, Vietnam, Myanmar, Bangladesh, dan Philippines. Berdasarkan data dari Kantor Jabatan Imigresen Malaysia (2005), jumlah pekerja migran pada tahun 1998 telah mencapai 210,772 orang. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Menurut statistik perkembangan tenaga asing di Malaysia pada tahun 2005, jumlah pekerja Indonesia di Malaysia meningkat lagi menjadi 1,105,083 orang. Dengan jumlah pekerja sebanyak itu, proporsi pekerja asing yang bekerja di Malaysia mencapai 69.9%. Persentase ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan persentase pekerja Indonesia terhadap total pekerja asing di Malaysia pada tahun 2001 hingga tahun 2003, yang persentasenya mencapai lebih dari 74.7% pada tahun 2001, 73.8% pada tahun 2002, dan 73.9% pada tahun 2003 (sumber: Kantor Jabatan Imigresen Malaysia, 2005).

Meskipun dalam lima tahun terakhir banyak kasus tindak kekerasan terhadap pekerja Indonesia, terutama terhadap tenaga kerja wanita (TKW) yang dilaporkan media massa di dalam negeri, namun dilihat dari jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia tidak ada bukti-bukti bahwa minat tenaga kerja Indonesia ke sana menurun. Yang terjadi malah sebaliknya, jumlah tenaga kerja Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

Pada tabel 1 terlihat bahwa tingkat pertumbuhan pekerja asing di Malaysia secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 3.54% dari tahun 1998 ke tahun 1999 (dari 395.140 orang menjadi 409.660 orang); kemudian melonjak sebesar 49.24% ke tahun berikutnya (2000) karena Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi luar biasa saat itu; lalu naik lagi sebesar 5.03% pada tahun 2001, melonjak lagi sebesar 20.39% tahun 2002; kemudian sedikit menurun kenaikannya sebesar 9.05% dan 7.06% pada tahun 2004 dan tahun 2005. Kontribusi pertumbuhan jumlah pekerja asing di Malaysia disumbang oleh Indonesia, karena *market share* tenaga kerja Indonesia selalu di atas 50% dari semua tenaga kerja asing di negara tersebut, sehingga menempatkan Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja terbesar di Malaysia dalam periode tahun 1998-2005.

Tabel 1 : Statistik Perkembangan Tenaga Kerja Asing di Malaysia, 1998-2005

	1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Indonesia	210,772	53.34	269,194	65.71	603,453	74.77	634,744	74.69	788,221	73.84	988,165	73.91	1,024,363	69.68	1,105,083	69.86
Nepal	368	0.09	328	0.08	666	0.08	48,437	5.70	82,074	7.69	109,067	8.16	149,886	10.20	159,531	10.09
India	14,330	3.63	13,103	3.20	18,934	2.35	26,312	3.10	39,248	3.68	63,166	4.72	78,668	5.35	93,339	5.90
Viet Nam	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	72,788	4.95	72,902	4.61
Myanmar	5,151	1.30	3,698	0.90	3,444	0.43	6,539	0.77	27,870	2.61	48,113	3.60	61,111	4.16	66,119	4.18
Bangladesh	146,752	37.14	110,788	27.04	158,149	19.59	114,308	13.45	82,642	7.74	94,541	7.07	54,929	3.74	53,751	3.40
Philippines	10,678	2.70	7,299	1.78	14,651	1.82	11,944	1.41	21,234	1.99	17,400	1.30	16,663	1.13	18,936	1.20
Thailand	2,864	0.72	2,130	0.52	2,335	0.29	2,508	0.30	20,599	1.93	10,158	0.76	5,463	0.37	5,573	0.35
Cambodia	137	0.03	163	0.04	812	0.10	1,399	0.16	2,408	0.23	2,898	0.22	3,278	0.22	3,514	0.22
Pakistan	4,054	1.03	2,605	0.64	3,101	0.38	2,392	0.28	2,000	0.19	2,141	0.16	1,156	0.08	1,171	0.07
Sri Lanka	34	0.01	352	0.09	1,386	0.17	1,115	0.13	1,111	0.10	1,066	0.08	1,003	0.07	979	0.06
China	0	0.00	0	0.00	165	0.02	131	0.02	122	0.01	265	0.02	600	0.04	688	0.04
Lain-lain	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	162	0.01	169	0.01
Jumlah	395,140	100.00	409,660	100.00	807,096	100.00	849,829	100.00	1,067,529	100.00	1,336,980	100.00	1,470,090	100.00	1,581,755	100.00
% pertumbuhan			3.54		49.24		5.03		20.39		20.15		9.05		7.06	

Sumber : Kantor Jabatan Imigrasi Malaysia, 2005 (diolah kembali)

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (2005), dalam jangka panjang ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja asing di Malaysia diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Tingkat penurunan kebutuhan terhadap jumlah tenaga kerja asing di Malaysia mencapai 13% dalam periode 1995-2005. Jadi, puncak pendayagunaan tenaga kerja asing di Malaysia adalah pada tahun 2005.

Gejala pengurangan tenaga kerja asing sebenarnya sudah nampak dalam dua tahun terakhir ini, terlihat dari sikap Pemerintah Malaysia yang mulai mengusir pekerja ilegal asal Indonesia secara besar-besaran pada tahun 2005. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, pihak Kepolisian Negara Malaysia demikian ketat dalam melakukan razia kepada pekerja asing di negaranya; polisi selalu mengadakan patroli di jalan dengan sering menangkap orang Indonesia yang dicurigai. Apabila ditemukan ada orang Indonesia yang tidak membawa pasport, maka yang bersangkutan ditangkap dan diamankan. Namun demikian, kebijakan pengusiran pekerja ilegal tersebut kurang efektif mengingat jumlahnya terlampaui banyak. Hal ini mengingat pula bahwa kehadiran pekerja asing di Malaysia tidak terlepas dari peranan agency dan majikan Malaysia yang memfasilitasi kedatangan mereka.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ada lima jenis pekerjaan pada sektor formal dan informal yang menjadi sasaran pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran dari negara-negara lainnya di Asia dan Eropa Timur. Jenis pekerjaan tersebut adalah pembantu rumah, pembinaan (pembangunan), perkhidmatan (pelayanan atau service), pembuatan (*manufacturing*), dan perladangan (perkebunan sawit dan karet). Jenis pekerjaan yang paling banyak diisi oleh pekerja migran asing di Malaysia adalah pembuatan (pembangunan). Jenis pekerjaan ini terisi oleh 39.1% dari seluruh pekerja migran asing pada tahun 1998, kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 37.9% pada tahun 1999, 38.1% pada tahun 1998, dan seterusnya sehingga persentasenya menjadi 36.8% pada tahun 2005.

Tabel 2 : Statistik Pekerja migran Berdasarkan Sektor di Malaysia Tahun 1998-2005

Sektor	1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pembantu rumah	77,918	19.7	94,192.0	23.0	177,546	22.0	194,710	22.9	232,282	21.8	263,465	19.7	285,441.0	19.4	286,483	18.9
Pembinaan	63,013	15.9	40,080.0	12.0	68,226	8.5	63,342	7.5	149,342	14.0	252,516	18.9	231,184.0	15.7	230,087	15.1
Pembuatan	154,337	39.1	155,277.0	37.9	307,167	38.1	312,528	36.8	323,299	30.3	385,478	28.8	475,042.0	32.4	582,648	36.8
Pekhidmatan	43,394	11.0	36,610.0	8.9	53,683	6.7	56,363	6.6	64,281	6.0	85,170	6.4	93,050.0	6.3	115,753	7.3
Perladangan	56,478	14.3	74,501.0	18.2	200,474	24.8	222,886	26.2	298,325	27.9	350,351	26.2	384,473.0	26.2	345,774	21.9
Jumlah	395,140	100.0	409,650.0	100.0	807,096	100.0	848,829	100.0	1,067,529	100.0	1,338,980	100.0	1,470,090.0	100.0	1,581,755	100.0
% Pertumbuhan	-		3.67		97.02		5.29		25.62		25.24		9.96		7.60	

Sumber: Jabatan Imigrasi Malaysia, 2005

Catatan: data statistik tahun 2005 dimulai dari 01.05.2004 hingga 30.04.2005

Jenis pekerjaan kedua yang paling banyak tersedia bagi pekerja asing di Malaysia adalah perladangan (perkebunan sawit dan karet), dengan persentase sekitar lebih dari 20% dari semua jenis pekerjaan, kecuali untuk tahun 1998 yang angkanya di bawah 20%, yakni hanya 14.3%, untuk tahun 1999 dan 18.2% untuk tahun 1999.

Jenis perladangan (perkebunan sawit dan karet) juga banyak diisi oleh pekerja asal Indonesia. Pekerja Indonesia yang banyak terlibat dalam jenis pekerjaan ini umumnya berasal dari Lombok, NTB. Keterampilan pekerja Indonesia dari Lombok di bidang pertanian dinilai cukup baik, sehingga sering menjadi langganan majikan pemilik perkebunan di Malaysia.

Jenis pekerjaan pembantu rumah (*house maid*), menduduki posisi ketiga dalam lapangan kerja yang tersedia di Malaysia yang banyak diisi oleh pekerja asing. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2005, persentase pekerja asing yang bekerja di Malaysia mencapai hampir 20%. Pekerja wanita dari Philippines dan Vietnam juga banyak yang bekerja sebagai pembantu rumah di Malaysia, tetapi tenaga kerja wanita Indonesia paling banyak.

Khusus mengenai pekerja wanita dari Filipina, gaji yang mereka terima besarnya dua kali lipat dari pekerja wanita asal Indonesia. Hal ini terjadi karena pekerja asal Philippines memiliki kelebihan dalam hal keterampilan teknis dan penguasaan bahasa dibandingkan pekerja asal Indonesia. Pemerintah Philippines tampaknya benar-benar mempersiapkan tenaga kerja wanita mereka secara matang. Bahkan, pemerintah Philippines menyediakan berbagai fasilitas pelayanan yang setiap saat membantu pekerjaanya ketika ada masalah di negara tujuan.

## VI. PERMASALAHAN SOSIAL TENAGA KERJA WANITA INDONESIA (TKW) DI MALAYSIA

Permasalahan yang dihadapi pekerja asing di Malaysia, hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur bahwa ada stereotype dari asal-usul majikan. Pada etnis Cina, permasalahan umum yang dialami TKW adalah tindak kekerasan (*domestic violence*); pada etnis India, kasus-kasus pelecehan seksual dan perkosaan; pada etnis Melayu, kasus-kasus gaji tidak dibayar.

Kasus kekerasan yang terjadi pada pekerja asal Indonesia sering dilakukan oleh majikan perempuan atau isteri. Menurut keterangan salah seorang TKW, bahwa sering ada kecemburuan majikan perempuan terhadap pekerja migran perempuan asal Indonesia. Hal ini tampaknya dilatarbelakangi oleh *stereotype* terhadap pekerja Indonesia di Malaysia, yakni sebutan "Indon". Istilah "Indon" ini berawal dari lingkungan prostitusi terhadap Pekerja Seks asal Indonesia di Malaysia.

Hasil pengamatan oleh Tim peneliti dan wawancara dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa banyak permasalahan sosial dihadapi TKW di shelter, antara lain banyak mengalami stress, sulit tidur, trauma, rindu kampung halaman, dan bosan/jenuh menunggu kasusnya selesai sehingga dapat segera kembali ke tanah air. Menurut catatan seorang mahasiswa Indonesia jurusan psikologi di Universiti Kebangsaan Malaysia (Muhammad Iqbal, 2005), perasaan TKW-bermasalah (80 orang) selama tinggal di shelter adalah: 42.86% merasa sedih, 17.14% merasa bingung, dan 9.52% merasa bosan.

Sedangkan sebagian lainnya 30.47% merasa aman, tenteram dan gembira. Dapat dikatakan bahwa secara nonfisik sebagian besar pekerja migran bermasalah di KBRI mengalami permasalahan sosial-psikologis.

Menurut data pada Bidang Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur, dalam tahun 2005 kasus pekerja migran atau TKW-bermasalah terbanyak terjadi pada bulan Februari. Sementara itu menurut data pada Bidang Konsuler, kasus yang dialami TKW (khususnya TKW di shelter) meliputi korban penyiksaan 14 orang, korban pelecehan seksual/ perkosaan 12, lari dari majikan 141 orang, gaji tidak dibayar 2 orang, pekerja seks 10 orang (korban *trafficking*), stres/sakit jiwa 2 orang, dan lain-lain 15 orang (ditelantarkan majikan/agency, tidak boleh kembali ke rumah majikan, dibuang oleh agency, dikembalikan ke agency oleh majikan, lari dari agency, ditipu tekong dan sebagainya). Hasil wawancara dengan TKW di shelter, diperoleh informasi bahwa TKW lari dari majikan dengan berbagai alasan. Alasan yang paling banyak adalah akibat tidak tahan perlakuan majikan yang kurang manusiawi; alasan lainnya karena pelecehan seksual/ perkosaan oleh majikan atau keluarganya, pemerasan, dan tidak betah tinggal di rumah majikan.

Hasil wawancara dengan TKW bermasalah dan pengamatan di shelter, TKW korban tindak kekerasan dan perkosaan mengalami kondisi psikologis yang buruk, yakni stress dan trauma. Pengalaman buruk, stress dan trauma, terutama dirasakan pada para pekerja migran perempuan korban perkosaan yang usianya relatif masih muda dan belum menikah. Mereka merasa bingung dan takut, apa yang harus dikatakan kepada orangtua/keluarganya bila ia kembali ke Indonesia. Bagaimana menghadapi calon suami bila kelak menikah. Dan banyak hal lain yang menjadi beban pemikiran mereka. Manifestasi dari berbagai perasaan dimaksud adalah munculnya perilaku sering menangis, sedih, atau berdiam diri dengan tatapan mata kosong.

Memperhatikan berbagai persoalan yang dihadapi TKW bermasalah tersebut tampaknya permasalahan sosial-psikologis cukup menonjol, selain permasalahan yang terkait dengan hukum dan hubungan kerja dengan majikan. Oleh karena itu banyak peran-peran

lain di KBRI, selain peran kekonsuleran dan peran ketenagakerjaan yang perlu diisi guna menanggulangi permasalahan yang dihadapi TKW-bermasalah. Peran profesi pekerja sosial dan psikolog tampaknya tidak dapat dilepaskan dalam penanganan masalah ini.

Mencermati kasus-kasus TKW pada uraian di atas, secara garis besar permasalahan sosial yang dihadapi dapat dikelompokkan seperti uraian berikut.

#### A. Masalah Tindak Kekerasan

Pada beberapa kasus menunjukkan bahwa pekerja migran kurang mendapatkan kebutuhan pangan, tempat tinggal dan kesehatan secara memadai. Banyak majikan lebih banyak menuntut pekerja migran untuk mengikuti segala aturan dan budayanya, tanpa memperhatikan kebutuhan dan budaya pekerja migran. Misalnya dalam hal makan, pekerja migran sering dipaksa untuk makan makanan yang tidak halal atau makanan lainnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja migran. Majikan kurang memperhatikan waktu istirahat yang cukup; yang dituntut majikan adalah bekerja dan bekerja tanpa pembatasan waktu atau jam kerja yang jelas. Apabila pekerja kurang atau tidak tampil sesuai dengan tuntutan majikan, maka cenderung terjadi tindak kekerasan dan atau pemaksaan kehendak oleh majikan. Sementara itu kontrol dari pihak-pihak yang bertanggung jawab (misalnya Agency) terhadap perilaku majikan hampir tidak ada. Saat penelitian ini dilakukan, pemenuhan kebutuhan yang memadai, hanya diperoleh pekerja migran yang bekerja di Kilang (pabrik), yakni yang tergolong pekerja formal.

Pada saat TKW-bermasalah berada di penampungan KBRI, karena sering *over capacity* menimbulkan pemenuhan kebutuhan mereka menjadi kurang optimal (kalau boleh dikatakan kurang); apakah berupa kebutuhan makan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan wanita lainnya. Belum lagi gangguan relasi antara TKW yang baru masuk shelter dengan mereka yang sudah lama berada di shelter. Sering muncul pula adanya kelompok-kelompok kedaerahan. Meskipun dalam hal ini pihak KBRI telah berusaha memberikan pelayanan secara maksimal, namun karena keterbatasan yang ada maka sering kurang memenuhi harapan.

## **B. Masalah Psikologis (Rasa Aman)**

Banyak pekerja migran (TKW) yang merasa terancam kehidupannya selama tinggal di rumah majikan. Mereka mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, tindak kekerasan, pembatasan dalam pergaulan, pelecehan seksual atau perkosaan oleh majikan maupun anggota keluarga lainnya. Mereka lebih banyak hidup terkurung dan dengan ruang gerak yang dibatasi. Mereka tidak akan pernah bisa keluar rumah kecuali bersama majikan, misalnya ke kedai/toko untuk membantu kegiatan majikan. Sementara itu pasport pekerja migran sebagai salah satu dokumen penting dipegang majikan, sehingga mereka benar-benar merasa terkurung.

Selama pekerja migran bermasalah ini berada di penampungan (shelter), juga menghadapi masalah-masalah psikis. Karena faktor keamanan dan lain-lain, maka mereka tidak dapat bebas keluar dari lingkungan KBRI. Dengan demikian mereka seolah terkurung dan kurang bebas menikmati dunia luar. Sementara itu keinginan untuk segera kembali ke tanah air tidak dengan mudah dan cepat dapat diperoleh. Banyak waktu dan prosedur penyelesaian kasus yang harus dilalui; sementara itu kegiatan pengisian waktu luang untuk menghilangkan kejenuhan masih sangat minim. Dalam kondisi yang demikian banyak di antara mereka yang menghadapi gangguan psikis, yakni umumnya sulit tidur.

Banyak upaya dilakukan pihak KBRI untuk memberikan perlindungan, tapi masih menghadapi keterbatasan-keterbatasan, masih banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak terjangkau oleh upaya perlindungan, terutama mereka yang ada pada rumah-rumah majikan-majikan. Apalagi para pekerja migran ilegal yang sulit untuk diketahui keberadaannya. Sementara ini upaya perlindungan dan advokasi diberikan setelah adanya kasus-kasus yang diadakan oleh pekerja migran maupun pihak lain, misalnya kepolisian Malaysia atau LSM yang peduli terhadap masalah pekerja migran.

Peran Agency untuk memberikan perlindungan dari tindakan eksploitasi, antara lain berupa nomor kontak kepada setiap pekerja migran yang disalurkan, hampir tidak pernah bisa terealisasi. Hal ini terjadi antara

lain oleh masih rendahnya kepedulian agency terhadap nasib pekerja migran. Di samping itu, rendahnya pengetahuan pekerja migran serta keterbatasan ruang gerak mereka, menyebabkan mereka hampir tidak pernah bisa kontak dengan Agency, kecuali terjadi kasus yang mencuat.

## **C. Masalah Kualitas SDM Rendah**

Penyiapan SDM TKW oleh lembaga pengirim yang kurang optimal, dan kurang serius menyebabkan TKW kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Sementara itu pembinaan keterampilan kerja dan keterampilan lainnya di negara tujuan tampaknya masih sangat minim. Agency di Malaysia hanya memberikan tambahan keterampilan yang sangat sedikit. Kondisi yang demikian menjadikan pekerja migran berada dalam posisi yang jauh lebih rendah dari pekerja asal negara lain, misalnya pekerja asal Philippines. Konsekuensinya gaji TKW jauh lebih rendah dari gaji pekerja asal Philippines (TKW paling tinggi 400 Ringgit per bulan, sedangkan pekerja migran asal Philippines mencapai 600-800 Ringgit per bulan).

## **D. Masalah Sosialisasi dan Interaksi**

Keterbatasan ruang gerak dan kurangnya perhatian para majikan, menjadikan pekerja migran Indonesia hidup tertutup dari kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dan kurang memperoleh informasi yang memadai tentang dunia luar. Berdasarkan pengalaman Agency, banyak pekerja migran kurang siap hidup di Malaysia. Mereka kurang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang majikan dan kehidupan di Malaysia. Para PJTKI di Indonesia dinilai kurang memberikan informasi yang cukup, terutama tentang pahit-manisnya dan susah-senangnya hidup di Malaysia. Pekerja migran sangat kurang dibekali pengetahuan sosial secara memadai, sehingga mereka kurang mempunyai kesiapan mental dan sosial. Apalagi dengan pendidikan mereka yang umumnya rendah mempengaruhi pula performan mereka dalam pekerjaan.

Proteksi majikan terhadap TKW untuk berinteraksi dengan dunia luar, termasuk dengan keluarga di daerah asal, menyebabkan TKW merasa makin terkurung dan buta dari informasi yang seharusnya mereka ketahui. Puncak dari keadaan demikian mendorong

TKW menghindari dengan cara melarikan diri dari majikan. Konsekuensinya adalah TKW kehilangan dokumen yang dibutuhkan (biasanya dokumen/pasport dipegang oleh majikan), sehingga bisa digolongkan sebagai TKW ilegal yang terancam hukuman dan deportasi.

## VII. PELAYANAN TERHADAP TKW DI MALAYSIA

### A. Pelayanan KBRI Kuala Lumpur Malaysia

Jumlah pekerja migran wanita di tempat penampungan sementara (shelter) KBRI Kuala Lumpur mencapai 205 orang (data bulan Oktober 2005). Usia mereka paling tinggi 43 tahun dan terendah berusia 17 tahun. Jumlah pekerja migran ini selalu berubah dari waktu ke waktu. Sering terjadi jumlah pekerja migran-bermasalah (TKW-bermasalah) yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dipulangkan ke Indonesia. Sering terjadi shelter terisi TKW-bermasalah dalam jumlah melampaui kapasitas normal. Kondisi yang demikian bagi KBRI merupakan beban yang tidak ringan.

Sementara ini petugas yang berperan sebagai pekerja sosial *volunteer*, yang sehari-hari siap di shelter hanya satu orang. Pada sisi lain dukungan anggaran untuk shelter masih belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah TKW-bermasalah yang ditampung. Dalam kasus tertentu, misalnya saat ada TKW melahirkan di shelter, para staf KBRI harus menghimpun dana dengan cara iuran untuk meringankan beban TKW-bermasalah tersebut.

Saat ini pihak KBRI merasa sangat terbantu dengan adanya dukungan dari para *volunteer* yang berasal dari unsur perguruan tinggi setempat, yakni para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Malaysia. Adanya *volunteer* ini dirasa sangat membantu tugas-tugas di shelter, terutama dalam hal bimbingan sosial dan konsultasi psikologi.

Hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa petugas di KBRI Kuala Lumpur, menunjukkan bahwa banyak upaya telah dilakukan oleh pihak KBRI untuk menyelesaikan kasus pekerja migran Indonesia di Malaysia. Upaya-upaya dimaksud antara lain mengadakan negosiasi dengan para majikan, dan

pendekatan dengan pihak Kepolisian maupun Imigrasi Malaysia. Pendekatan diplomasi juga terus dilakukan untuk mendorong pemerintah Malaysia mempercepat proses pengadilan sesuai dengan azas keadilan dan kemanusiaan. Namun demikian sampai saat ini dirasa belum memperoleh hasil yang optimal. Banyak kasus dapat diselesaikan tetapi banyak kasus pula yang belum terselesaikan, sementara itu terus bertambah dari hari ke hari.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama berada di KBRI Kuala Lumpur dan daerah-daerah di mana pekerja migran bekerja di kota Kuala Lumpur, tampaknya banyak beban pekerjaan yang dialami oleh KBRI terutama Bidang Konsuler dan Bidang Ketenagakerjaan dalam penyelesaian masalah pekerja asal Indonesia di Malaysia. Sementara itu banyak permasalahan yang bersifat psiko-sosial (misalnya stress, tidak bisa tidur, dan trauma) belum tersentuh secara memadai oleh petugas KBRI. Hal ini terkait masih terbatasnya pelayanan yang ada, yakni sifatnya sementara dan lebih banyak berupa penyelesaian kasus perselisihan atau hukum. Meskipun demikian, dalam praktek penyelesaian masalah, ada peran-peran dan fungsi sosial yang secara tidak sengaja tetapi terbatas telah dilakukan oleh petugas KBRI, misalnya melakukan identifikasi masalah pekerja migran yang saat ini ada di shelter, dan bahkan memberikan pelayanan konseling bagi mereka. Tetapi apa yang telah diberikan oleh pihak KBRI tampak masih kurang memadai, terutama dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi TKW-bermasalah.

Permasalahan yang dihadapi KBRI dalam penyelesaian masalah pekerja migran, terutama dalam hal pemulangan adalah sulitnya untuk mendapatkan "Check-out Memo" dari Kantor Imigrasi Malaysia. *Check-out memo* adalah sebuah solusi terobosan yang ditempuh pihak Imigrasi Malaysia agar pekerja migran bermasalah dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

Sementara ini ada kecenderungan pemerintah Malaysia kurang memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pekerja migran bermasalah. Banyak pekerja migran perempuan yang sudah cukup lama menunggu kasusnya disidangkan oleh Lembaga Pengadilan di Malaysia. Menurut pengamatan petugas KBRI, pemerintah Malaysia terkesan

lambat dalam penyelesaian kasus pengadilan pekerja migran. Kondisi yang demikian menjadikan beban KBRI semakin berat terutama dalam hal penyediaan fasilitas penampungan, antara lain penyediaan makanan, pelayanan medis, dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi mereka.

Menyikapi berbagai permasalahan pekerja migran di Malaysia, menurut pihak KBRI, diperlukan MoU atau bila perlu "diplomatic agreement" antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam penggunaan tenaga kerja asal Indonesia, termasuk perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Pihak KBRI Kuala Lumpur bakal mendapat 'kekuatan' luar biasa kalau Pemerintah Indonesia di Jakarta melakukan intervensi diplomatik untuk menyelesaikan masalah pekerja migran di Malaysia.

## B. Pelayanan Agency di Malaysia

Setiap "Agency" di Kuala Lumpur secara hukum harus mempunyai izin operasi atau dalam istilah Malaysia "berlisensi". Namun demikian menurut informasi seorang pengurus agency, banyak pula agency yang tidak berlisensi alias "nakal". Sebuah agency biasanya mempunyai beberapa partner di negara asal pekerja migran, seperti di Indonesia partnernya adalah sejumlah PJTKI.

Jumlah pekerja migran Indonesia disalurkan oleh sebuah agency di Malaysia rata-rata 30 orang per bulan. Pekerja migran ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, Sumatra, dan Sulawesi. Menurut pengurus agency, biasanya untuk tenaga kerja informal (pembantu rumah/*house-maid*) yang paling disukai oleh majikan adalah orang dari Jawa Tengah, karena mereka lebih lembut, patuh dan penurut. Sedangkan untuk pekerja perladangan/perkebunan umumnya berasal dari Lombok.

Mereka menerima tenaga kerja dari PJTKI dengan identitas sesuai dokumen yang ada. Dalam hal penerimaan dan penyaluran tenaga kerja wanita (TKW), mereka umumnya kurang memperhatikan kepentingan TKW. Agency selama ini tidak mempersoalkan apakah identitas TKW sesuai atau tidak, yang penting secara hukum memenuhi syarat. Selama ini agency sebenarnya mengetahui bahwa banyak

TKW yang identitasnya dipalsukan, baik nama, usia, alamat maupun identitas lainnya.

Menurut agency, salah satu persyaratan calon TKW di Malaysia yang harus dipenuhi adalah berusia 25 tahun. Selama ini banyak calon TKW yang usianya sebenarnya jauh di bawah 25 tahun, namun mereka merasa tidak berkepentingan dengan hal itu. Kepentingan mereka adalah menerima dan menyalurkan TKW sesuai dengan kebutuhan calon majikan. Terhadap beberapa kasus yang terjadi, para agency cenderung menyalahkan pihak pengirim (PJTKI) dan Instansi di negara asal. Mereka beranggapan bahwa masalah pemalsuan identitas dan ketidaksiapan TKW merupakan urusan pemerintah Indonesia.

Prosedur penyaluran TKW selama ini dengan cara majikan menjemput TKW di tempat agency, dengan persyaratan membayar biaya sesuai kesepakatan. Praktek yang selama ini terjadi bahwa majikan tidak memberikan gaji TKW selama tiga sampai empat bulan sebagai ganti biaya kepada agen. Dengan kata lain, TKW baru akan menerima gaji pada bulan yang keempat atau kelima. Dalam kenyataan gaji itupun tidak diberikan langsung setiap bulan, tetapi 'disimpan' oleh majikan, dan akan diberikan kalau kontrak kerja sudah selesai. Kontrak kerja untuk pembantu rumah tangga adalah dua tahun, dan setelah itu bisa diperpanjang, dengan syarat harus kembali dulu ke Indonesia dan mengajukan permohonan kembali kepada PJTKI.

Penyiapan TKW oleh PJTKI, khususnya dalam hal pelatihan menurut kalangan agency di Malaysia masih sangat minim. Untuk itu biasanya pihak agency memberikan pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan calon majikan, misalnya dalam hal penggunaan alat-alat elektronik. Latihan ini dilakukan secara sangat praktis dan singkat. Lamanya TKW di penampungan agency berarti memperbesar beban biaya yang harus ditanggung oleh agency. Mereka umumnya berpendapat bahwa semakin cepat pekerja migran disalurkan akan semakin baik dan menguntungkan. Bagi calon pekerja pada Kilang (pabrik-pabrik), biasanya harus sudah dipersiapkan oleh PJTKI sesuai dengan lapangan pekerjaan yang akan dimasuki.

Upaya perlindungan agency kepada pekerja migran dapat dikatakan masih sangat

minim. Selama ini setiap pekerja migran diberikan nomor kontak khusus yang sewaktu-waktu dapat dihubungi, terutama bila pekerja migran merasa perlu mengadakan permasalahannya. Namun demikian dalam beberapa kasus, mereka sering menghilang dari majikan tanpa sepengetahuan agency. Menurut pengalaman beberapa pekerja migran perempuan (TKW) yang diwawancarai, ternyata dengan dipegangnya paspor akan membatasi ruang gerak mereka, dan mereka tidak dapat pergi/keluar tanpa majikan. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan kurang mempunyai kesempatan untuk mengadakan kontak dengan pihak agency. Apalagi dari segi pendidikan dan pengetahuan mereka umumnya sangat rendah.

Mengenai hari libur bagi pekerja migran perempuan, ternyata pihak agency kurang setuju, karena akan banyak timbul masalah. Menurut mereka, TKW dapat terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, kemungkinan mereka menggunakan waktunya untuk lari dari majikan. Kondisi yang berbeda terjadi pada pekerja migran dari Philippines. Pekerja asal Philippines memperoleh waktu istirahat dua kali dalam sebulan. Hal ini bisa terjadi karena ada ketentuan yang dituntut pemerintah Philippines terhadap pengguna tenaga kerja asal Philippines. Sedangkan terhadap kasus pekerja migran Indonesia, agency berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia memperjuangkan agar diusahakan pembatasan jam kerja dan standar gaji minimal.

Gaji pekerja asal Philippines saat ini mencapai 600-800 Ringgit per bulan, sementara itu pekerja asal Indonesia paling tinggi hanya menerima gaji 400 Ringgit per bulan. Hal ini terjadi karena pekerja dari Philippines dianggap mempunyai keterampilan tinggi dari pada pekerja dari Indonesia. Mereka lebih mampu melakukan beberapa tugas, antara lain membimbing belajar tambahan di rumah bagi anak-anak majikan, pembayaran rekening listrik atau telepon, dan sebagainya.

Dalam hal terjadinya kasus-kasus pada pekerja migran perempuan, selama ini yang paling dihindari oleh para agency adalah keterlibatan LSM yang bergerak dalam pembelaan (advokasi) pekerja migran. Menurut kalangan majikan dan agency, LSM sangat "galak" terhadap para agency, para majikan

dan instansi pemerintah Malaysia. Hal ini terjadi terutama bila mereka menelantarkan atau memperlakukan pekerja migran secara tidak manusiawi. Untuk itu mereka biasanya menghindari keterlibatan LSM dalam penyelesaian masalah pekerja migran perempuan.

Terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor informal, pengurus agency mempunyai beberapa usul. *Pertama*, mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan adanya batasan jam kerja bagi pekerja migran perempuan dalam sehari; memperjuangkan standard gaji minimal; dan melakukan kontrol terhadap terjadinya penyimpangan dari kontrak kerja oleh majikan. *Kedua*, agency Malaysia juga menyarankan kepada Penyalur Tenaga Kerja Indonesia di Indonesia untuk menyiapkan calon tenaga kerja wanita dengan serius sehingga menguasai keterampilan. *Ketiga*, menyarankan kepada tenaga kerja wanita Indonesia untuk tidak ikut-ikutan menjadi tenaga kerja tanpa persiapan yang matang.

### C. Pelayanan Majikan/Perusahaan

Perusahaan yang berhasil ditemui dan diwawancarai adalah sebuah perusahaan elektronik yang memproduksi hardware untuk komputer, yakni Western Digital Sdn Berhad. Perusahaan ini banyak mempekerjakan pekerja

migran perempuan dari Indonesia, terutama untuk jenis-jenis pekerjaan pada level bawah (operator produksi). Pekerja migran perempuan (TKW) asal Indonesia pada perusahaan ini khususnya berasal dari daerah Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Persyaratan pendidikan mereka minimal pada tingkat SLTP. Kondisi pekerja dari Indonesia saat ini seluruhnya berpendidikan SLTA. Pekerja ini tergolong dalam tenaga kerja formal, yang kehidupannya lebih terlindungi.

Perekrutan pekerja migran ini melalui sebuah perusahaan penerah tenaga kerja di Medan, Sumatera Utara. Perusahaan elektronik tersebut mempunyai kontak langsung dengan perusahaan penerah tenaga kerja di Sumatera Utara. Pada saat perekrutan biasanya wakil dari perusahaan elektronik Malaysia tersebut menyempatkan datang ke Indonesia untuk melihat langsung kesipan calon pekerja yang akan direkrut.

Penyiapan pekerja migran khususnya dalam hal kesiapan kerja sebelum pekerjaan resmi dilakukan di pabrik, dilakukan persiapan oleh perusahaan setelah pekerja tiba di Kuala Lumpur. Pelatihan dilaksanakan di lingkungan perusahaan, dalam waktu 1-2 minggu sebelum menduduki job yang disiapkan. Para calon pekerja ini bekerja dengan sistem kontrak selama 2 tahun, dan tidak dapat diperpanjang lagi kecuali yang bersangkutan mendaftar kembali melalui perusahaan penerah tenaga kerja di Indonesia.

Selama bekerja di perusahaan tersebut, pekerja migran memperoleh fasilitas asrama yang disediakan oleh pihak perusahaan. Sedangkan untuk kebutuhan makan dan lain-lain menjadi urusan sendiri pekerja karena sudah mendapatkan gaji. Penyimpanan dan pengiriman uang hasil kerja pekerja migran pada perusahaan ini dilakukan melalui sebuah bank yang direkomendasi oleh pihak perusahaan.

Kondisi pelayanan sosial pekerja migran di sektor formal ini tampaknya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan mereka di sektor informal, terutama pembantu rumah tangga. Hal yang sama dialami baik sektor formal maupun informal, adalah bahwa pihak majikan atau perusahaan menahan paspor pekerjanya. Paspor akan dikembalikan setelah selesai kontrak, dan akan kembali ke Indonesia. Selama tinggal di Malaysia, pekerja migran di perusahaan memperoleh kartu identitas pengganti, yang sudah diketahui oleh pihak Kepolisian maupun Imigrasi Malaysia. Alasan mereka mengamankan paspor pekerja adalah untuk menghindari pekerja migran pindah ke perusahaan lain tanpa izin perusahaan yang bersangkutan, atau keluar tanpa izin sebelum kontrak berakhir. Bila hal ini terjadi maka pihak perusahaan merasa dirugikan, karena sudah mengeluarkan biaya rekrutmen dan pelatihan bagi calon pekerja.

## VIII. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap berbagai informasi khususnya tentang permasalahan pekerja migran wanita Indonesia di negara tujuan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan sosial yang dihadapi pekerja wanita Indonesia atau TKW di Malaysia muncul dipicu oleh berbagai hal, baik yang berasal dari dalam diri TKW, maupun yang berasal dari luar dirinya seperti perlakuan agency, perlakuan majikan, dan jaminan hukum yang kurang memadai.
  2. Permasalahan TKW di Malaysia tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab PJTKI di Indonesia dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Persiapan tenaga kerja wanita kurang memadai, sementara itu ekspektasi majikan terlampau tinggi, sehingga tidak ada titik temu antara harapan dengan kenyataan.
  3. Lamanya TKW-bermasalah tinggal dalam shelter KBRI dalam jumlah besar (kadang-kadang mencapai 200 orang) dengan kapasitas ruang yang sangat terbatas, membuat mereka hidup dengan berbagai tekanan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Situasi demikian menambah beban sosial dan psikologis bagi mereka. Masalah sosial-psikologis ini terutama banyak dialami oleh TKW korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual atau perkosaan. Sementara itu hingga kini belum ada pelayanan kesejahteraan sosial yang cukup memadai.
  4. Pemerintah Malaysia tampaknya kurang peduli dengan keadaan dan masalah pekerja Indonesia di Malaysia. Sementara ini perundang-undangan ketenagakerjaan di Malaysia masih terbatas memberikan perlindungan pada pekerja sektor formal, dan belum menjangkau pada pekerja informal. Oleh karena itu pekerja di sektor informal di Malaysia tidak mendapat perlindungan secara memadai. Pemerintah Malaysia hingga kini belum meratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan tenaga kerja di sektor informal yang dirancang oleh ILO.
- ### B. Rekomendasi
1. Upaya paling efektif untuk menyelesaikan secara komprehensif dan antisipatif atas permasalahan TKW adalah kesepakatan

- dan penandatanganan atas Konvensi ILO mengenai perlindungan tenaga kerja di sektor informal antara Indonesia dengan Malaysia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan intervensi diplomatis terhadap Pemerintah Malaysia baik secara langsung Jakarta-Kuala Lumpur, maupun melalui kantor perwakilan kedutaan besar, berupa kesepakatan-kesepakatan untuk memberikan perlindungan terhadap TKW selama bekerja di Malaysia.
2. Solusi fundamental tersebut perlu waktu, sedangkan penanganan TKW-bermasalah yang sudah dalam kondisi memprihatinkan perlu segera dilakukan. Oleh karena itu, Departemen Luar Negeri dengan Departemen Sosial perlu melakukan kerjasama yang memungkinkan tenaga profesional (*care worker* dan *social worker*) bisa melakukan tugas-tugas fungsionalnya sepanjang atas permintaan dan kebutuhan KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada TKW-bermasalah. Pelayanan kesejahteraan sosial dimaksud mulai dari konseling, mediasi, pendampingan, motivasi, advokasi, dan bantuan sosial (permakanan, kelengkapan tidur, memasak, bermain, dan pengisian waktu luang).
  3. Calon-calon diplomat yang akan ditempatkan pada negara-negara yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asal Indonesia, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Hongkong, Saudi Arabia, Jepang, dan Korea Selatan, perlu mendapatkan pengetahuan praktis mengenai masalah sosial dan pelayanan sosial bagi pekerja asal Indonesia. Untuk itu, Departemen Sosial dan Departemen Luar Negeri diharapkan bisa menjalin kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan calon diplomat, sehingga materi kesejahteraan sosial bisa masuk dalam kurikulum Diklat Departemen Luar Negeri. Untuk itu, Departemen Sosial hendaknya dapat memberikan masukan materi Diklat tentang isu sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial disertai dengan tenaga pengajarnya.
  4. Dalam jangka panjang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia perlu memperbaiki sistem pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri dengan lebih baik dan terkoordinasi, agar tenaga kerja wanita Indonesia bisa bersaing di luar negeri, dan mengurangi segala kemungkinan tindak kekerasan oleh majikan. Oleh karena itu, sistem administrasi kependudukan dan prosedur rekrutmen bagi mereka yang akan berangkat ke luar negeri untuk tujuan bekerja di sektor informal dapat terkontrol secara ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI, (2004). *Kajian Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Pekerja Migran*. Kerjasama Ditjen Banjamsos, Depsos. RI dengan Forkomsam Lingkup Kesra, Dit. BSKTKPM, Jakarta.
- Dubois, Brenda., & Kogsrud Milley. (1992). *Social Work: An Empowering Profession*. USA: Allyn & Bacon.
- Esmara, Hendra. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Goodin, Robert E. (1990). Relative Needs, in Ware, Alan and Robert E. Goodin (eds). *Needs and Welfare*. London: SAGE Publications Ltd.
- Huttman, Elizabeth D. (1981). *Introduction to Social Policy*. McGraw-Hill Book
- Kahn, Alfred. (1973). *Social Policy and Social Services*, Random House, New York.

- Mubyarto, (1979). *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Pelita III*, Prisma, Januari, 1979
- Midgley, James. (1995). *Social Development, The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publication Ltd. London.
- Rubington, Earl., & Martin S., Waiberg. (1995). *The Study of Social Problem, Seven Perspective*, Oxford University Press, New York.
- Suharto, Edi. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran*. Bandung: LSP-STKS Bandung.
- Sutaat, Dkk. (2000). *Pelayanan Kesaejahteraan Sosial Tenaga Kerja di Sektor Industri*. Jakarta: Puslit PKS, Balatbangsos, Depsos R.I.
- Tagaroa, Rusdi & Sofia, Encop. *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan, Solidaritas Perempuan*, Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia.

#### BIODATA PENULIS :

Sutaat, lahir di Tegal (1 Januari 1951). Pendidikan Sarjana Muda diperolehnya dari UMJ (1980), sedangkan S1 diraihnya dari STKS Bandung (1984). Ia memulai karir sebagai PNS di PPA Bambu Apus (1975), selanjutnya alih tugas ke Balitbang Kessos (1985). Jabatan sekarang adalah Peneliti Madya (2005-sekarang).

Pernah memimpin beberapa kegiatan Penelitian internal (Litbang Kessos), antara lain yaitu: (1) Partisipasi masyarakat Kota dalam Mengatasi Masalah Sosial Pasca Krisis (2003), (2) Persepsi Legislatif Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (2004).

Kegiatan penelitian internal (Litbang Kesos) lainnya yang telah dilakukan dan dibukukan antara lain: (1) Prilaku Remaja di Daerah Pinggiran Kota (2004); (2) Identifikasi Kebutuhan Pelayanan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (2003), dan (3) Analisis Kebutuhan Pekerja Sosial di Pusat Pelayanan Korban Bencana (2003).

Kegiatan penelitian yang dilakukan kerjasama dengan institusi lain, antara lain: (1) *Survey on Accessibility Problems to Pantis and Vocational Rehabilitation Service after Decentralization in Indonesia* (yayasan Kandidat, 2003), (2) *Kajian Magement Kessos Panti Sosial DKI Jakarta* (YASHINTHA, 2002), (3) *Ketahanan Sosial Masyarakat Daerah Perkotaan* (Pusbang Tansosmas, 2002), (4) *Studi Persiapan Daerah dalam Pelaksanaan Strategi dan Pelayanan Sosial bagi Anjal* (YASHINTHA, 2002), dan (5) *Tanggung Jawab Sosial Industri* (Kantor MASKAT, 2000).